

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan dapat:

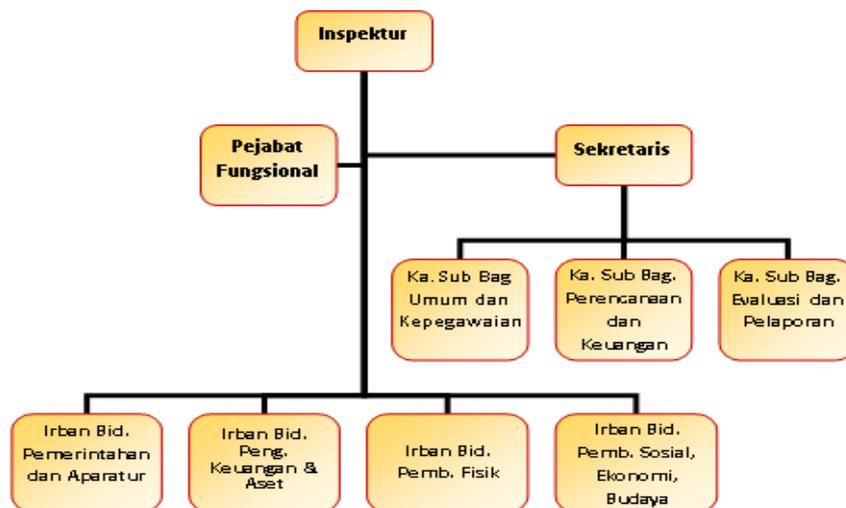
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Inspektorat Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta.

Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Bagan I. 1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 menetapkan bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan;

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan respon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Kota Yogyakarta , antara lain sebagai berikut:

1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Yogyakarta.
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APiP.
4. Adanya tuntutan Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1.4 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 121 orang, jumlah pegawai yang ada 61 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 60 orang atau 49,59 %.

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2020 sebanyak 62 (enam puluh dua) yang terdiri dari 62 orang PNS. Dan didukung oleh 1 orang PTT/Naban serta 2 orang tenaga teknis .

Tabel I. 1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2020

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	: Pembina Utama Muda/Gol. IVc	1 orang
Sekretaris	: Pembina TK I/Gol IV b	1 orang
Inspektur Pembantu	: Pembina TK I/Gol IV b	2 orang
	: Pembina /Gol. IVa	2 orang
Kepala Sub Bagian	: Penata TK I/Gol. III d	3 orang
Auditor Madya	: Pembina Utama Muda/Gol. IVc	2 orang
	: Pembina /Gol. IVa	2 orang
Auditor Muda	: Penata TK I/Gol. III d	7 orang
	: Penata /Gol. III c	3 orang
Auditor Pertama	: Penata Muda TK I/Gol. III b	8 orang
	: Penata Muda /Gol. III a	6 orang
Auditor Pelaksana	: Penata Muda /Gol. III a	2 orang
Auditor Kepegawaian	: Penata Muda /Gol. III a	2 orang
Auditor Terampil	: Pengatur /Gol. II c	8 orang
Fngsional Umum	: Penata TK I/Gol. III d	4 orang
	: Penata /Gol. III c	1 orang
	: Penata Muda TK I/Gol. III b	2 orang
	: Penata Muda /Gol. III a	1 orang
	: Pengatur TK I/Gol. II d	1 orang
	: Pengatur/ Gol. II c	2 orang
	: Pengatur Muda TK I/Gol. II b	2 orang
Tenaga Bantu	:	1 orang
Tenaga Teknis	:	2 orang

Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	: 6 orang
2	S1	: 39 orang
3	D3	: 10 orang
4	SMA/SMK	: 6 orang
5	SMP	: 1 orang
6	SD	: 0 orang

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2020

Tabel I.3. Jumlah Pegawai dibanding beban kerja/bezeting Tahun 2020

No.	Jabatan	Formasi	Bezeting	%
1.	Struktural	9	9	14,52
2.	Auditor	71	38	61,29
3.	P2UPD	5	0	0
4.	Auditor Kepegawaian	4	2	3,22
5.	Fungsional Umum	32	13	20,97
	Jumlah	121	62	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin Tahun 2020

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural	4	5
2	Auditor	22	18
3	Fungsional Umum	7	6
	Jumlah	33	29

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Inspektorat Kota Yogyakarta menempati gedung baru di Jl. Kenari Nomor 51 Yogyakarta dengan luas tanah 730 m² terdiri bangunan 1.176 m².

Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yaitu:

Tabel I. 6. Profil Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ideal
1	Kendaraan Roda 2	13 unit	13 unit
2	Kendaraan Roda 4	6 unit	6 unit
3	Handycam	2 buah	2 buah
4	LCD Proyektor	3 buah	3 buah
5	Camera digital	3 buah	3 buah
6	Rollmeter	3 buah	3 buah
7	Scanner	3 buah	3 buah
8	Komputer	25 buah	25 buah
9	Printer	24 buah	24 buah
10	Lap Top	29 buah	29 buah
11	Pengukur ketebalan besi	1 buah	1 buah

12	Checker penghitung	2 buah	2 buah
13	Pengukur Test beton	2 buah	2 buah
14	Telephone PABX LG	2 buah	2 buah
15	Meteran Laser	4 buah	4 buah
16	Telephone SLJ world phone	1 buah	1 buah
17	Mesin Penghancur Kertas	2 buah	2 buah
18	Tablet	1 buah	1 buah
19	Voice recorder	1 buah	1 buah
20	Whiteboard 2 muka	1 buah	1 buah
21	Wireles	2 buah	2 buah
22	Air Purifyer	2 buah	2 buah
23	Meja kubikal	24 buah	24 buah
24	Kursi kerja	36 buah	36 buah
25	TV	8 buah	8 buah
26	Scaner portable	4 buah	4 buah
27	Genset	1 buah	1 buah

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2020

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2020 Inspektorat Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.971.074.436,- Anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.8. Anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 20120

Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Anggaran (DPPA)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.172.025.000,-
BELANJA LANGSUNG	799.049.436,-
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443.184.952,-
1 Penyediaan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.588.700,-
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.596.252,-
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.289.500,-
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	21.675.000,-
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56.614.500
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-

1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.520.000,-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2.500.000,-
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	166.366.100,-
1	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	10.048.700,-
2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	156.317.400,-
VI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	23.641.000,-
1	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	10.641.000,-
2	Review Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	13.000.000,-
VII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	15.053.200,-
1	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	13.139.200,-
2	Review Pengadaan Barang Jasa	1.914.000,-
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	27.168.900,-
1	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	10.414.500,-
2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	16.754.400,-
IX	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	42.825.784,-
1	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	42.825.784,-

Sumber Data : Sub Bag Perencanaan & Keuangan, Desember 2020

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, Potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Inspektorat Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan dengan indikator capaian sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan dengan indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Inspektorat Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah : Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3,40.

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Prosentase	80 %	83 %	91	91	91	91
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Meningkatkan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian	Nilai	-	-	3,33	3,40	3,40	3,40

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)

Sedangkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian

intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016).

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Meningkatkan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pembinaan Kepatuhan Aparatur
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Review Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	
			Peningkatan Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja baik murni maupun perubahan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Nilai	3,40

Pada tahun 2020, Inspektorat melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan anggaran.

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 6.416.946.528,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.929.817.000,- dan Belanja Langsung Rp 2.487.129.528,-. Dampak adanya pandemi, anggaran dilakukan rasionalisasi melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp 4.971.074.436,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 4.172.025.000,- dan Belanja Langsung Rp 799.049.436,-.

2.3.1 Target Belanja Inspektorat Kota Yogyakarta

Tabel 2.6 Target Belanja Inspektorat Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 4.172.025.000,-	83,93 %
Belanja Langsung	Rp 799.049.436,-	16,07 %
Jumlah	Rp 4.971.074.436,-	100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Inspektorat Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan	Rp 275.054.984,-	34,42 % (belanja langsung)	Perubahan APBD (5 program dan 9 kegiatan)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Inspektorat Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Nilai	3,40	3,00	88,24 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Inspektorat tidak memenuhi target dengan capaian kinerja **88,24 %**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis **"Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat"** dengan indikator kinerja **"Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern"** diuraikan sebagai berikut:

No	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	-	-	3,37*	3,40	3,00**	88,24	3,40	88,24 %

Keterangan :

* hasil self assement tahun 2019

** hasil Quality Assurance (QA) tahun 2019 oleh BPKP Pusat

Dapat kami sampaikan disini , bahwa dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2019 sejak melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

a. Tahap Persiapan

Meliputi penetapan satuan kerja yang diuji petik, tim asesor dan counterpart serta rencana (kerangka acuan kerja) penilaian maturitas. Hasil Quality Assurance menunjukkan tim assessor dan counterpart telah mengikuti workshop SPIP dan sebagian diklat SPIP, jumlah responden memenuhi syarat sebanyak 11,80% atau 619 orang dari total pegawai 5.242 orang.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam ini proses assessment baik survey persepsi maupun validasi/pembuktian secara umum sudah sesuai pedoman. Adapun jumlah OPD yang diuji petik sebanyak 28, sedangkan validasi atau pembuktian dilakukan pada 25 subunsur SPIP sebagai focus assessment. Namun hasil pembuktian tersebut belum sepenuhnya mendukung hasil penilaian level maturitas pada beberapa subunsur. Unsur yang mengalami perubahan nilai yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian serta pemantauan pengendalian intern.

c. Tahap Pelaporan

Hasil self assessment secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang terdigitalisasi, tetapi rekomendasi yang diberikan tidak sampai level optimum.

3.2.1 Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal”. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,40	3,00	88,24 %

Formula penghitungan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian adalah sebagai berikut : “Hasil Penilaian (Monev) BPKP terhadap 5 (lima) unsur SPIP yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern.

Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2020 senilai 3,00 merupakan hasil Quality Assurance atas penilaian self assessment maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP Pusat. Jika dibanding dari target

yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD adalah 3,40 atau baru tercapai 88,24 %. Penurunan nilai sebesar 0,37 ini disebabkan adanya perubahan nilai maturitas SPIP pada 3 unsur yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian

Ada penurunan nilai pada empat subunsur dari delapan subunsur lingkungan pengendalian yaitu :

- a. Subunsur penegakan integritas dan nilai etika, dari level 4 turun ke level 3.
- b. Subunsur kepemimpinan yang kondusif, turun dari level 5 menjadi level 3.
- c. Subunsur struktur organisasi sesuai kebutuhan, dari level 4 ke level 3.
- d. Subunsur perwujudan peran APIP yang efektif, turun dari level 4 menjadi level 3.

Adapun yang menyebabkan penurunan pada keempat subunsur tersebut belum ada bukti telah dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan/SOP dan implementasinya pada masing-masing subunsur.

2. Kegiatan Pengendalian

Dari sebelas subunsur kegiatan pengendalian terdapat tiga subunsur yang mengalami penurunan nilai pada :

- a. Subunsur reviu kinerja, semula level 5 turun ke level 3.
- b. Subunsur penetapan dan reviu indikator, dari level 5 menjadi level 3.
- c. Subunsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi/kejadian, turun dari level 4 ke level 3.

Penurunan ketiga subunsur ini diakibatkan belum ada bukti telah dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan/SOP dan implementasinya pada subunsur tersebut serta pemantauan berkelanjutan secara otomatis dan terintegrasi yang antara lain dapat didukung dengan adanya sistem informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan otomatis.

3. Pemantauan

Unsur pemantauan pengendalian intern turun dari level 4 menjadi level 3 pada subunsur evaluasi terpisah, hal ini disebabkan belum ada bukti telah dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan/SOP dan implementasinya pada subunsur tersebut.

2. Indikator Sasaran Strategis

Inspektorat menetapkan Indikator Sasaran yang sama dengan Indikator Tujuan yaitu "Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern". Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan target tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian kinerja 2020
1	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80 %	83 %	91 %	91,90	91%	98,39	108,12 %
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	-	-	3,33	3,37	3,40	3,00	88,24 %

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern merupakan indikator untuk mencapai Tujuan dan Sasaran / IKU Inspektorat yaitu “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat”. Melalui indikator tersebut dapat diketahui seberapa tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil quality assurance penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2020 yang dilakukan oleh BPKP Pusat dan Perwakilan Yogyakarta, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada tingkat **terdefinisi** dengan skor sebesar **3,00** terinci sebagai berikut:

Unsur SPIP	Bobot %	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
		skor	nilai	skor	nilai	
- Lingkungan Pengendalian	30	3,6250	1,0875	3,0000	0,9000	(0,1875)
- Penilaian Resiko	20	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	(0,0000)
- Kegiatan Pengendalian	25	3,4545	0,8636	3,0000	0,7500	(0,1136)
- Informasi dan Komunikasi	10	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	(0,0000)
- Pemantauan	15	3,5000	0,5250	3,0000	0,4500	(0,0750)
Jumlah	100		3,3761		3,0000	(0,3761)
Keterangan	Level 3 (Terdefinisi)					

Jika dibandingkan antara hasil self assessment dengan quality assurance ada penurunan skor pada 3 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan pemantauan. Adapun karakteristik tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada **Level 3 (Terdefinisi)**. Ini menunjukkan Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumen yang memadai.

Hasil penilaian maturitas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta bila disandingkan dengan kabupaten lain se provinsi DIY adalah Kota Yogyakarta berada dibawah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan berada diatas Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul (sumber www.bpkp.go.id)

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain :

1. Belum adanya kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah;
2. Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan resiko;
3. Belum adanya implementasi pengelolaan resiko melalui identifikasi dan analisis resiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian resiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian resiko dan implementasi RTP.

Selama ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan maturitas SPIP, dalam hal ini Inspektorat selaku assessor telah melakukan :

1. Adanya pembinaan kepada OPD terkait substansi penilaian resiko dan pengelolaannya, termasuk kepada Bappeda selaku OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan, sehingga pengelolaan resiko dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan;
2. Selalu meningkatkan kualitas pengelolaan resiko, meliputi perumusan resiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP, termasuk penyusunan resiko atas tujuan strategis pemerintah daerah;
3. Meningkatnya pemahaman atas substansi dari system pengendalian internal dan pengelolaan resiko, sehingga terbentuk pola manajemen resiko yang handal untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. APIP Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD; serta
6. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing OPD.

3.2.2 Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dan Tahun Sebelumnya

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

1. Kinerja Tujuan

Tujuan Inspektorat “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” merupakan tujuan baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, sehingga kinerja tujuan Inspektorat Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun lalu merupakan hasil self assement Inspektorat.

Kinerja tujuan Inspektorat Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Kinerja Tujuan Tahun 2017 s/d 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuan	2017			2018			2019			2020		
			Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian
1	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80 %	88 %	106 %	83 %	88 %	106 %	91	91,9 0 %	102, 11 %	91%	98,3 9 %	108, 12 %
2	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	-	-	-	-	-	-	3,33	3,37	101, 20 %	3,40	3,00	88,2 4 %

Kinerja tujuan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tujuan tahun 2020 karena hasil tahun 2020 merupakan kelanjutan proses dari tahun 2019, dimana tahun 2019 hasil self assessment atau penilaian sendiri. Sedangkan realisasi tahun 2020 merupakan hasil Quality Assurance yang dilakukan oleh BPKP secara berjenjang.

2. Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran Inspektorat Tahun 2017 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2017 s/d 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2017			2018			2019 *			2020**		
			Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	-	-	-	-	-	-	3,33	3,37	102, 20 %	3,40	3,00	88,2 4 %

Keterangan * hasil self assessment

** hasil QA oleh BPKP Pusat

Sama halnya dengan kinerja tujuan, kinerja sasaran tahun 2020 juga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja sasaran tahun 2019 karena merupakan hasil dari self assessment.

3. Kinerja Program

Indikator Kinerja Program pada Tahun 2019 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Tabel 3.7. Perbandingan Kinerja Program Tahun 2018 s/d 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	100 %	109, 89	91%	100 %	109, 89	91%	100 %	109, 89%
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	97 %	106, 59 %	91%	89, 29 %	98,1 2%	91%	88,2 4	96,9 6
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91%	100 %	109, 89	91%	100 %	109, 89	91%	100 %	109, 89%
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	100 %	109, 89	91%	75%	82,4 2%	91%	100 %	109, 89 %
5	Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	83%	88 %	106 %	85%	91,3 5%	107, 47%	87%	98,3 9%	113, 09%
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk elemen penil	level 3 (untuk elemen penil		level 3 (untuk elemen penil	level 3 (untuk elemen penil	100 %	level 3 (untuk elemen penil	level 3 (untuk elemen penil	100 %

			aian)	aian)		aian)	aian)		aian)	aian)	
--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi diatas target yang ditetapkan. Empat indicator kinerja memiliki capaian kinerja ≥ 100 %, sedangkan satu indikator 96,96 %.

3.2.3 Realisasi Kinerja Dan Target Renstra

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Strategis 2017 – 2022. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat :

Tabel 3.8. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Targ et 2019	Reali sasi 2019	Target Renstra	Capaian Kinerja	Targ et 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Capaian Kinerja
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,33	3,37	3,40	99,12 %	3,40	3,00	3,40	88,24 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2020 baru 88,24 % dibandingkan dengan target akhir renstra.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat :

Tabel 3.9. Perbandingan Kinerja Program Dengan Target Akhir Renstra

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	100%	91%	109,89%
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	88,24 %	91%	96,97 %
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91%	100%	91%	109,89%
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	100 %	91%	109,89%
5	Peningkatan Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87%	98,39%	91%	113,09%
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)			

Data tersebut menunjukkan bahwa kelima indikator kinerja sudah melebihi capaian kinerja jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Meskipun ada satu indikator kinerja yang belum memenuhi target tetapi capaian kinerjanya sudah baik, akan dilakukan akselerasi atau percepatan agar pencapaian target kinerja dapat sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi temuan masih dalam proses karena menyangkut kebijakan.

1.2.4 Evaluasi Kinerja

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan” pada tahun 2020 adalah **BELUM BERHASIL** dengan capaian kinerja 88,24 %.

Belum berhasilnya pencapaian kinerja sasaran Inspektorat ini lebih disebabkan karena faktor eksternal seperti yang sudah kami paparkan diatas. Dimana keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat sangat ditentukan dan dukungan kerjasama dari semua OPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini pelaksanaan SPIP di masing-masing OPD. Adapun indikator kinerja program di internal Inspektorat sebagai pendukung dari pencapaian kinerja sasaran.

Dari lima program yang memuat enam indikator kinerja program, sebagian besar dinyatakan **BERHASIL** dengan lima program memiliki capaian sebesar $\geq 100\%$ dan satu program memiliki capaian $\leq 100\%$ namun masih diatas target akhir renstra maupun tahun 2020.

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Program ini memiliki satu indikator program yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Tahun 2017 s/d 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80%	100%	93,75 %	91 %	100%	109,89 %	91 %	100%	109,89	91%	100%	109,89%

Penjelasan tabel 3.10 sebagai berikut :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

Inspektorat melalui Bidang Pemerintahan dan Aparatur melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur, yang juga merupakan indikator kinerja program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan kegiatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur telah melaksanakan audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu. Realisasi sebesar 100 % dengan Capaian kinerja 109,89 % baik pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 3.11 Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi dan tindaklanjut tahun 2017 s/d 2020

Audit	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut									
Operasional	9	20	20	1	2	2	4	8	8	0	0	0
ADTT	7	11	10	9	15	15	4	8	8	0	0	0
Jumlah	16	31	30	10	17	17	8	16	8	0	0	0

Keberhasilan dari program tersebut diatas didorong oleh dukungan OPD telah melaksanakan fungsi tugas pokoknya dengan maksimal dan menjlankan 3 E secara baik. Analisis efisiensi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Analisis efisiensi anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target Program	Realisasi Indikator Program	%
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	166.366.100	164.772.850	99,04%	91%	100%	109,89%

Dapat dilihat dari kinerja indikator program bahwa kinerja program melebihi kinerja anggaran yang berarti bahwa anggaran dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur adalah **SANGAT EFISIEN**. Adapun anggaran yang tidak terealisasi dari dana cetak dan penggandaan laporan, yang bersifat fleksibel dimana penggunaannya tergantung jumlah halaman laporan yang dibuat.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Program ini memiliki satu indikator program yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017 s/d 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	80 %	100 %	100 %	91%	97 %	106,59 %	91%	89,29 %	98,12 %	91 %	88,24 %	96,96 %

Penjelasan tabel 3.13 sebagai berikut :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Inspektorat melalui Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset, yang juga merupakan indikator kinerja program, dengan melaksanakan audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu. Realisasi sebesar 88,24 % dengan Capaian kinerja 96,96%. Dapat dilihat ada penurunan dalam capaian baik pada tahun 2019 dan tahun 2020, meski dilihat dari sisi jumlah temuan dan rekomendasi berkurang dari tahun ke tahun. Namun masih ditemui adanya rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti/masih dalam proses. Mungkin perlu ditingkatkan koordinasi dengan OPD mitra kerja di bidang keuangan dan aset terutama yang ada temuan, dan tidak harus memaksimalkan waktu batas tindak lanjut (60 hari) terlebih untuk temuan bersifat administrasi.

Tabel 3.14 Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut tahun 2017 s/d 2019

Audit	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut									
Operasional	20	41	41	7	17	16	9	27	25	7	12	10
ADTT	2	3	3	9	22	22	1	3	2	3	5	5
Jumlah	22	44	44	16	39	38	10	30	27	10	17	15

Analisis efisiensi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset disajikan sebagai berikut :

:

Tabel 3.15. Analisis efisiensi anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target Program	Realisasi Indikator Program	%
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	23.641.000	22.633.250	95,74	91%	88,24 %	96,96%

Dapat dilihat dari kinerja indikator program bahwa kinerja program hampir sama dengan kinerja anggaran, ada efisiensi sebesar 4,26 %. Adapun anggaran yang tidak terealisasi dari dana cetak dan penggandaan laporan, yang bersifat fleksibel dimana penggunaannya tergantung jumlah halaman laporan yang dibuat.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik

Program ini memiliki satu indikator program yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik Tahun 2017 s/ 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian									
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pembangunan fisik	80 %	100 %	100 %	91%	100 %	109,89	91%	100 %	109,89%	91%	100 %	109,89%

Inspektorat melalui Bidang Pembangunan Fisik melaksanakan pengawasan di bidang fisik, yang juga merupakan indikator kinerja program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pembangunan Fisik, telah melaksanakan audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu. Realisasi sebesar 100 % dengan Capaian kinerja 109,89 % baik pada tahun 2019 dan 2020.

Keberhasilan dari program tersebut diatas didorong oleh dukungan OPD yang sangat proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan obyek pemeriksaan yang ada

temuannya hanya ada dua OPD dan langsung ditindaklanjuti pada masa pemeriksaan. Dan penerapan SPIP sudah berjalan baik.

Tabel 3.17 Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut tahun 2017 s/d 2020

Audit	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut									
Operasional	8	23	23	0	0	0	1	3	3	1	2	2
ADTT	1	4	4	0	0	0	1	2	2	1	3	3
Jumlah	9	27	27	0	0	0	2	5	5	2	5	5

Analisis efisiensi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18. Analisis efisiensi anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target Program	Realisasi Indikator Program	%
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	15.053.200	14.154.400	94,03 %	91%	100%	109,89%

Dapat dilihat dari kinerja indikator program bahwa kinerja program melebihi kinerja anggaran yang berarti bahwa anggaran dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Pembangunan Fisik adalah **EFISIEN** dengan efisiensi sebesar 5,97 %. Adapun anggaran yang tidak terserap dari dana cetak dan penggandaan laporan, yang bersifat fleksibel dimana penggunaannya tergantung jumlah halaman laporan yang dibuat.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

Program ini memiliki satu indikator program dimana capaian target belum terpenuhi. Capaian kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya Tahun 2017 s/d 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	80 %	94,73 %	84,45 %	91%	100 %	109,89 %	91%	80 %	87,91 %	91%	100 %	109,89%

Inspektorat melalui Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya melaksanakan pengawasan di bidang pembangunan sosial ekonomi budaya, yang juga merupakan indikator kinerja program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, telah melaksanakan audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu. Realisasi sebesar 100% dengan Capaian kinerja 109,89 %. Di bidang ini mengalami kenaikan yang signifikan dalam pencapaian kinerja program, upaya yang dilakukan terus menerus melakukan koordinasi dengan OPD mitra dan terlebih adanya timbal balik kerjasama yang baik dengan OPD. Selain itu untuk tahun 2020 jumlah OPD dan temuan juga hanya satu bersifat administrasi sehingga cepat ditindaklanjuti.

Tabel 3.20 Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi dan tindaklanjut tahun 2018 s/d 2020

Audit	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut									
Operasional	5	8	8	11	15	15	4	9	5	1	2	2
ADTT	7	11	10	5	9	9	6	11	11	0	0	0
Jumlah	12	19	18	16	24	24	10	20	16	0	0	0

Analisis efisiensi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21. Analisis efisiensi anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target Program	Realisasi Indikator Program	%
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	27.168.900	27.011.300	99,42	91%	100%	109,89%

Dapat dilihat dari kinerja indikator program bahwa kinerja program sama dengan capaian kinerja anggaran yang berarti bahwa anggaran dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dibilang **SANGAT EFFISIENSI** sebesar 0,58 %.

e. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

Program ini memiliki dua indikator program dimana capaian target sudah terpenuhi semua. Capaian kinerja Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.22. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan Tahun 2018 s/d 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	83%	88 %	106 %	85%	91,35%	107,47%	87%	98,39 %	113,09 %
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 2 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 4 elemen penilaian)	level 3 (dengan 2 catatan	level 3 (untuk 3 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	100 %	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	100 %

Sebagai catatan untuk capaian kinerja Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan, data tersebut diatas terutama hasil pemeriksaan BPK kami anggap semua sudah ditindaklanjuti berupa surat walikota dalam menindaklanjuti temuan BPK. Namun yang menentukan temuan itu selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat.

Tabel 3.23 Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal tahun 2020 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Realisasi
			Selesai	Dalam Proses	Belum sesuai tindaklanjut	
Inspektorat Kota	13	24	22	2	0	91,67
Inspektorat DIY	16	28	28	0	0	100,00
BPKP	19	20	20	0	0	100,00
Irjen Teknis	0	0	0	0	0	0,00
BPK	52	52	52	0	0	100,00
Jumlah	74	124	122	2	0	98,39

Analisis efisiensi Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.24. Analisis efisiensi anggaran Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target Program	Realisasi Indikator Program	%
1.	Peningkatan Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	42.825.784	42.784318	99,90	87%	98,39%	113,08%

1.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 97,88 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 98,66 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,47 %.

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	443.184.952	434.457.255,74	98,03%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.289.500	73.785.106	94,25%
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.520.000	2.520.000	100 %
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	166.366.100	164.772.850	99,04%
6.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	23.641.000	22.633.250	95,74%
7.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	15.053.200	14.154.400	94,03%
8.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya	27.168.900	27.011.300	99,42%
9.	Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	42.825.784	42.784.318	99,90%
	JUMLAH	799.049.436,-	782.118.479,74	97,88 %

Dari delapan program yang dilaksanakan yang memiliki realisasi di atas 95 % ada enam program. Terdapat dua program dan tiga kegiatan yang realisasinya dibawah 95 % yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi 93,82 %, belanja BBM/pelumas tidak terserap secara optimal.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuang dan Aset pada kegiatan Pengawasan Bidang Keuangan dan Aset terealisasi 93,91%. Dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik pada kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik terealisasi 93,87%. Serapan realisasi anggaran pada kedua program dan kegiatan tersebut pada rekening penggandaan laporan hasil audit, dimana tiap laporan tidak bisa diprediksi anggarannya. Namun secara keseluruhan capaian kinerja keuangan dan fisik tahun 2020 sudah memenuhi target.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif masih belum memenuhi target, tetapi penyerapan anggaran secara keseluruhan (belanja langsung) sebesar 97,88 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.26. Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat efisiensi
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	88,24%	97,88%	2,12%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Sasaran Strategis Inspektorat baru mencapai kinerja sebesar 88,24 % dan dikatakan **EFISIEN** dengan efisiensi anggaran sebesar 2,12 %.

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis Inspektorat “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan ” dengan indikator kinerja “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern ” diperoleh capaian kinerja sebesar 88,24 %. Belum tercapainya kinerja tersebut masih adanya beberapa faktor penghambat , antara lain :

1. Belum adanya kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah;
2. Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan resiko;
3. Belum adanya implementasi pengelolaan resiko melalui identifikasi dan analisis resiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian resiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian resiko dan implementasi RTP.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :

1. Akan merevisi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 dan 32 Tahun 2018.
2. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis OPD, dan resiko operasional (kegiatan) OPD dengan tujuan memperbaiki kualitas rumusan resiko, penyebab, dampak, RTP sehingga relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.
3. Melaksanakan penilaian resiko strategis pemerintah daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
4. Melaksanakan penilaian resiko strategis OPD dan dimutakhirkan secara berkala.
5. Melaksanakan penilaian resiko operasional (kegiatan) OPD dan dimutakhirkan secara berkala.
6. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko Strategis.
7. Melakukan revisi pedoman audit kinerja.
8. Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada OPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

LAMPIRAN:

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja tahun 2020
- Lampiran 5. Rencana Aksi
- Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya